

# Laporan Studi Lapangan

REGENERASI  
KEPEMIMPINAN  
NASIONAL:  
ANTARA PESIMISME  
DAN OPTIMISME



Oleh : Tim Redaksi



tetapi isu yang dihembuskan oleh media massa secara besar-besaran dalam lima bulan terakhir ini, juga menyebarkan wacana yang pesimistis terhadap politisi muda. Syamsuddin mengatakan: "sebenarnya sebelum kasus Nazarudin meletus, banyak warga Kaltim berharap banyak terhadap Anas Urbaningrum sebagai pengganti potensial dalam kepemimpinan nasional. Di sini sudah banyak yang membayangkan bahwa Anas adalah Presiden RI di masa depan. Akan tetapi setelah ada kasus korupsi yang diduga melibatkan dia, dan makin terkuaknya proses ia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat secara tidak fair, maka mulai banyak yang pesimis. Kemudian juga disusul oleh kasus Wisma Atlet Palembang yang menyebut-nyebut Andi Malarangeng, demikian pula korupsi di jajaran Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyebut Muhaimin Iskandar, membuat masyarakat tidak banyak berharap terhadap politisi muda", katanya.

Suara senada juga diungkapkan oleh Atmadji, salah satu pimpinan di jajaran Dinas Kominfo Provinsi Kaltim. Atmadji mengatakan kasus-kasus yang melibatkan politisi muda semakin mengindikasikan bahwa tidak banyak yang bisa diharapkan terhadap mereka. Pergantian kepemimpinan nasional tetap akan didominasi oleh kelompok tua, meskipun sebagian besar warga masyarakat, khususnya di Kaltim, sebenarnya menginginkan pergantian oleh kalangan politisi muda, akan tetapi karena politisi muda belum bisa dipercaya maka rakyat menjadi kecewa. Kekecewaan rakyat ini bisa juga dimanifestasikan pada apatisme terhadap politik. "Sekarang ini rakyat ingin perubahan, ingin politisi muda tampil, karena selama ini kalangan generasi tua yang terus berambisi jadi pemimpin. Di Kaltim Gubernurnya juga dari kalangan generasi tua, demikian pula tokoh politik di Partai Golkar misalnya, juga kebanyakan masih kalangan generasi tua. Jadi wajar jika masyarakat menghendaki tampilnya generasi muda. Akan tetapi setelah muncul kasus yang kemungkinan melibatkan Anas, Andi, dan Muhaimin, dan sejumlah tokoh muda lainnya yang di daerah-daerah juga banyak terlibat korupsi, maka rakyat tidak

berharap, atau paling tidak apatis", kata Atmadji.

Atmadji selanjutnya menilai bahwa kalangan politisi muda ternyata masih belum matang, dan terlalu terburu-buru. Mereka itu masih perlu banyak belajar dan belum berpengalaman. Kalangan generasi muda kurang banyak pengalaman. Tidak seperti pada era Orde Baru dahulu, mekanisme seleksi kepeimpinannya cukup ketat untuk kalangan generasi muda. Ada mekanisme yang jelas, meskipun sosok Soeharto selalu menentukan. Sekarang ini tidak ada tokoh yang disegani seperti Soeharto, sehingga semuanya bertindak sekehendaknya, termasuk dalam mekanis perekrutan pemimpin. Karena itu menurut Atmadji, sangat wajar jika di daerah-daerah banyak pimpinan daerah dari kalangan muda, tetapi kemudian mereka harus berurusan dengan aparat penegak hukum. "Mereka itu pimpinan yang masih belum banyak pengalaman, belum banyak makan asam garam dan pahit getirnya menjadi pemimpin. Singkatnya mereka itu masih dapat dikatakan sebagai pemimpin karbitan, jadi wajar kalau cepat tumbang", katanya.

Menyinggung soal fungsi partai politik (Parpol) dalam menjalankan kaderisasi, baik Syamsuddin Tang maupun Atmadji menilai bahwa Parpol kurang berhasil dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik. Syamsuddin mencontohkan, bahwa semestinya Parpol menetapkan kriteria calon pemimpin, tetapi mekanisme ini tidak jalan. Salah satu sebabnya adalah bahwa basis ekonomi Parpol kurang kuat, maka kemudian terbuka bagi pendatang baru untuk menjadi calon pemimpin, asal mereka punya uang. Kriteria pemimpin sudah ditetapkan, seperti jujur, pintar, dan memiliki kapasitas sebagai seorang manajer. Tetapi ini tidak jalan karena yang kemudian menjadi faktor penentunya adalah basis ekonomi calon, sehingga menyingkirkan calon pemimpin yang pintar, jujur, dan kompeten. "Parpol gagal menjalankan fungsi regenerasi sebagai akibat kegagalan dalam menjaga konsistensi terhadap kriteria normatif calon pimpinan daerah. Sekarang ini jujur dan pintar bukan merupakan kriteria menjadi pemimpin. Kalah dengan mereka yang punya uang



banyak, meskipun belum teruji kejujuran dan kompetensinya. Parpol sekarang lebih pragmatis ketimbang ideologis. Kubu ideologis selalu kalah dengan kubu pragmatis", kata Syamsuddin, yang juga Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Persatuan Pembangunan Kaltim.

Gejala adanya krisis kepercayaan terhadap politik juga melanda di kalangan masyarakat awam Kota Samarinda. Di kalangan moda transportasi seperti sopir taxi dan sopir angkutan kota misalnya, tidak peduli lagi terhadap kepemimpinan nasional. Apatisme politik ini terlihat bahwa mereka tidak antusias terhadap politik, karena menurut mereka tidak ada gunanya. Siapa pun pemimpinnya sekarang ini yang penting adalah mampu mensejahterakan rakyat, gampang cari kerja, dan aman. Akan tetapi kebutuhan akan kesejahteraan dan rasa aman itu sekarang sulit didapat. Di kalangan armada transportasi ini umumnya lebih suka di era Orde Baru. "Anak muda sekarang kalau sudah jadi pemimpin cepet lupa, dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Lihat aja itu Anas, Nazarudin atau Gayus, kalau sudah di atas hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga tidak mau bagi-bagi rejeki. Apalagi Parpol, wah itu hanya mikir dirinya sendiri. Dulu jaman Pak Harto cari rejeki lebih mudah, sekarang sulit sekali, dan sedikit-sedikit banyak protes dan demo-demo, sehingga sering macet. Pokoknya tidak seperti dulu, ketika jaman Pak Harto", kata Darius, salah seorang sopir taxi.

Syamsyuddin mengakui bahwa sekarang ini boleh dikatakan bahwa tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap Parpol berada pada titik nadir. Warga sudah tidak percaya lagi pada Parpol, karena ulah para elite politik memang kurang membawa aspirasi konstituennya. "Sudah saatnya Parpol sekarang introspeksi bahwa sekarang harus berorientasi pada kepentingan publik. Parpol harus mampu menjadi agen perubahan dan menjalankan fungsi rekrutmen politik yang baik agar mampu melahirkan generasi pemimpin muda yang berkualitas", tegasnya.

#### **Yogyakarta: Politisi Muda Mulai Tampil**

Dalam sebuah acara Kick Andy yang

ditayangkan MetroTV pada tanggal 25 Maret 2012, Amien Rais menyatakan bahwa untuk presiden RI 2014-2019 sebaiknya dari kalangan muda, yaitu antara usia 50-60 tahun. Menurut Amien sekarang harus memberi kesempatan kepada kalangan muda untuk masuk ke bursa pemimpin nasional. "Calon-calon presiden seperti Prabowo, Hatta Rajasa, Pramono Anung, dan tokoh muda lainnya harus menjadi prioritas untuk dipilih sebagai presiden", katanya.

Sebagai seorang tokoh di Yogyakarta, dan Indonesia pada umumnya, Amien Rais senantiasa konsisten untuk mendorong kaum muda dalam berkiper di dunia politik. Ketika Pilihan Wali Kota Yogyakarta 2011, Amien mendorong putranya yang masih sangat muda, Hanafi Rais, untuk maju mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Yogyakarta. Meskipun akhirnya kalah tipis dengan Haryadi Suyuti, tetapi Amien ingin menunjukkan bahwa saat sekaranglah harus memberi kesempatan bagi kaum muda untuk menjadi pemimpin.

Akan tetapi pada kenyataannya, masyarakat Indonesia masih menghendaki kalangan generasi tua menjadi pilihan utama sebagai pemimpin nasional. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang bertajuk "Mencari Calon Presiden 2014", menempatkan Megawati Soekarnoputri di urutan teratas dengan perolehan 15,2 persen, disusul Prabowo Subianto 10,6 persen, Jusuf Kalla 7 persen, Aburizal Bakrie 5,6 persen, dan Hamengkubuwono X memperoleh 4,9 persen. Survei tersebut memberikan gambaran bahwa kalangan politisi tua masih menjadi pilihan masyarakat.

Salah satu sebab mengapa warga masyarakat masih memilih tokoh tua, menurut Ketua DPRD Provinsi DIY, Juke, antara lain karena politisi muda masih dianggap rentan terhadap godaan material. Munculnya kasus Anas Urbaningrum dan Andi Malarangeng yang diduga terlibat korupsi menjadi salah satu sebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi muda. "Saya kira patut disayangkan, ketika popularitas Anas naik, masyarakat berharap bahwa dialah tokoh yang berpotensi menjadi salah satu pemimpin nasional. Akan tetapi begitu terkena isu



dugaan korupsi, maka popularitasnya merosot tajam, dan berimplikasi terhadap makin menurunnya harapan masyarakat terhadap kaum politisi muda”, katanya.

Menyinggung kader muda di kalangan PDI-P sendiri, Yoeke Indra Agung Laksana yang merupakan salah satu kader muda PDI-P, berpendapat bahwa memang harus diakui bahwa sosok Megawati masih menjadi magnet kuat dalam memperoleh dukungan masyarakat. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa kaderisasi di tubuh partai berlambang kepala banteng gemuk ini mulai berjalan cukup lancar. Sejumlah tokoh muda terus didorong untuk tampil ke panggung politik nasional. “Kami di PDI-P terus berupaya mendorong terjadinya regenerasi dalam kepemimpinan. Tokoh-tokoh muda seperti Ganjar Pranowo, Puan Maharani, dan Pramono Anung misalnya, terus diminta tampil sebagai pelopor dalam regenerasi politik di tubuh PDI-P”, jelasnya.

Yoeke sendiri adalah politisi muda, berusia sekitar 38 tahun, sudah menduduki pucuk pimpinan di dalam PDI-P, duduk sebagai Ketua DPC Provinsi DIY. Tampilnya Yuke menjadi indikator bahwa regenerasi politik dalam parpol tampak mulai terasa. Sementara itu tampilnya GKR Pambayun, putri Sultan Hamengkubuwono X juga merupakan indikator bahwa di Yogyakarta mulai tampil tokoh-tokoh muda dalam kancah politik. Pambayun adalah Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DIY dan aktif dalam gerakan sosial kebudayaan, termasuk dalam dunia politik kaum muda. Beberapa tokoh muda asal Yogyakarta juga mulai berkiprah di tingkat nasional, sebut saja misalnya Mahfud MD adalah warga Yogyakarta, dan demikian pula Deny Indrayana adalah tokoh muda yang mulai tampil di panggung politik nasional. Sementara itu, dari kalangan Ormas keagamaan, Haidar Natsir adalah tokoh muda yang menduduki salah satu Ketua PP Muhammadiyah Pusat.

Menurut Juli Qodir, salah seorang tokoh muda Muhammadiyah, meskipun harus diakui bahwa pamor politik kaum muda sekarang agak menurun, tetapi ke depan perlu upaya agar mulai terjadi regenerasi politik. Ia berpendapat bahwa saatnya sekarang mulai berpikir ke depan dengan

memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk tampil di panggung politik nasional. “Regenerasi politik itu suatu yang niscaya, suka tidak suka mesti terjadi. Karena itu kaum politisi muda sendiri harus belajar untuk mempersiapkan diri, karena regenerasi tak terhindarkan”, katanya.

Akan tetapi, Parpol yang merupakan wahana bagi kaderisasi pemimpin sekarang ini cukup menghadapi masalah. Yoeke berpendapat, bahwa sekarang ini harus diakui bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Parpol memang sedang mengalami penurunan signifikan. Terlibatnya beberapa politisi dalam kasus korupsi, ketidakpedulian parpol dan juga lembaga legislatif terhadap berbagai persoalan kerakyatan seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan, menjadikan warga masyarakat tidak banyak berharap terhadap kinerja Parpol. “Kami menyadari, saat ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Parpol memang rendah. Akan tetapi kami terus berbenah dan mawas diri untuk kemudian memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Saya sendiri selalu membuka diri kepada aduan dan keluhan masyarakat tentang berbagai masalah publik selama 24 jam”, kata Yoeke di ruang kerjanya.

Fadjar Sudarwo, seorang tokoh LSM Yogyakarta, memberikan komentar bahwa sekarang kinerja politisi dan lembaga legislatif kurang optimal. Mereka lebih memikirkan kepentingan kelompok dan bahkan dirinya sendiri. Boleh jadi itu disebabkan oleh sistem pemilihan langsung yang memang memerlukan biaya besar. Akibatnya para politisi, termasuk yang muda-muda, bersikap pragmatis dengan orientasi cari uang untuk menutup defisit dana yang dikeluarkannya sewaktu kampanye. “Sekarang ini banyak anggota DPRD terbelit utang, sehingga wajar kalau mereka mencari dana untuk mengembalikan hutang-hutannya”, katanya.

Sementara itu Sosiolog UGM, Heru Nugroho, berpendapat bahwa pragmatisme politik memang juga melanda di kalangan politik muda. Salah satu sebab utamanya adalah perubahan sosial yang cenderung ke arah modern, sehingga semuanya harus serba uang. Oleh karena itu siapa pun harus bersikap rasional dalam menghadapi



problem sehari-hari. Para politisi muda yang biasanya idealis dan ideologis, tetapi mereka harus tidak berdaya terhadap arus pragmatisme politik. "Mereka harus rasional, karena sekarang ini semua kebutuhan harus dipenuhi dengan instrumen uang. Tanpa uang, masyarakat juga tidak bergerak, semua kegiatan perlu uang. Sekarang ini sulit sekali menggerakkan masyarakat tanpa uang. Modal sosial dan gotong royong itu sekarang tinggal mitos", katanya.

### Makasar: Gejala Pragmatisme

Persepsi yang berkembang di Makasar terhadap kepemimpinan nasional jika dikaitkan dengan proses regenerasi terkesan bernada pesimis. Bahkan pendapat seperti itu datang kalangan tokoh muda sendiri. Jamaluddin Syamsir, Ketua KNPI Sulawesi Selatan berpandangan bahwa pada Pemilu 2014 memperkirakan tidak akan banyak perubahan yang berarti dalam kepemimpinan bangsa. Siapa yang akan muncul dalam panggung politik nasional, tentu akan didominasi oleh tokoh dari kalangan Parpol besar seperti Partai Golkar, Demokrat, atau PDI-P. "Di luar itu hanya wacana. Tetapi harus juga diakui bahwa, kaum muda sendiri jika diberi peluang bisa mengecewakan karena lebih tidak bermartabat dari yang tua", katanya.

Untuk menjadi pemimpin bangsa harus melalui pergulatan panjang, perlu melewati proses jatuh-bangun dan perjuangan. Tidak mungkin akan melahirkan seorang pemimpin bangsa yang berkualitas, atau bahkan negarawan, jika semuanya hanya berjalan melalui jalan pintas alias karbitan. Menurut Syamsir siapa pun yang menjadi pemimpin ia harus melewati proses panjang dan teruji terkait dengan kualitas, intelektual, integritas moral dan kemampuan mengelola persoalan bangsa. "Itu semua menjadi prasyarat untuk menjadi pemimpin bangsa", tegasnya.

Lebih lanjut Syamsir mengatakan bahwa harapan akan tampilnya generasi muda untuk mengambil alih kepemimpinan bangsa pada pasca Pemilu 2014 belum mungkin terwujud, karena masih didominasi oleh ketua-ketua partai politik yang sebagian besarnya adalah generasi

tua. Untuk itu upaya yang harus dilakukan dari sekarang adalah mendorong anak-anak muda masuk ke dalam lingkaran kabinet untuk menunjukkan prestasi yang luar biasa dalam kapasitasnya sebagai leader. Di samping itu mereka juga harus masuk dalam proses kompetisi di internal partai terlebih dahulu untuk mendapatkan kesempatan dengan tetap menjaga kualitas dan integritas moralnya.

Akan tetapi, pada kenyataannya sekarang ini kurang ada mekanisme seleksi yang ketat di tingkat partai politik, sehingga pemimpin bangsa, termasuk di level daerah, terasa tidak matang. Sebagaimana diungkapkan oleh Touloto TRS, Kepala Kesbangpol Provinsi Sulawesi Selatan, gejala yang terjadi sekarang ini adalah siapa saja yang mau jadi pemimpin, apakah itu bupati, gubernur, maupun presiden asalkan punya duit sangat terbuka, meskipun tanpa latar belakang yang jelas. Kalau orang seperti ini terpilih, maka tidak akan bisa diharapkan hasil dari kepemimpinannya, bahkan bisa mendatangkan kerusakan. "Oleh karena itu sekarang mau dibuat aturan yang mencoba memberi solusi kalau Gubernurnya dari partai politik maka wakilnya dari birokrasi karir, meskipun dalam prakteknya, peran partai politik tetap kuat dalam menentukan siapa orangnya", katanya.

Sekarang Indonesia menurut Touloto sudah punya banyak tokoh muda yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin bangsa yang siap tampil di pentas nasional. Namun sayangnya sebagian besar dari mereka "tersandung kasus hukum." Sehingga tampilnya generasi muda sebagai pemimpin bangsa, khususnya pada Pemilu 2014 mengalami sedikit hambatan. Masyarakat cenderung mempersoalkan kredibilitas mereka karena terkait dengan kasus hukum tersebut.

Pendapat senada juga disampaikan Ismunandar, Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Hasanudin, sulit kita mengahrapkan partai politik sekarang ini memproduksi kader-kader pemimpin yang berkualitas. Kondisi parpol sebagai sebuah organisasi politik sangat tidak profesional. Sebagai contoh sederhana misalnya dapat dilihat pada kondisi kantor-kantor partai politik,



baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota apalagi di tingkat kecamatan dan desa. Ketika selesai Pemilu, tidak ada aktivitas apa-apa, kantor kosong dan tidak terurus. "Bagaimana mereka mengelola bangsa, kalau kerjanya model musiman. Dalam rekrutmen anggota DPR dan DPRD juga cenderung dilakukan tidak sistematis, sehingga hasilnya pun diragukan kualitasnya. Sampai saat ini tidak terlihat satu orang pun kader pemimpin dari kalangan parpol yang meniti karir mulai dari bawah. Model pengkaderan pemimpin seperti itu tentu tidak bisa kita harapkan membawa perubahan untuk kemajuan bangsa", tegasnya.

Menyinggung tokoh muda, Ismunandar berpendapat bahwa sebenarnya proses pengkaderan di luar parpol cukup baik. Sebagai ilustrasi di kalangan mahasiswa, organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) selama ini terus melakukan upaya untuk melahirkan generasi muda pemimpin bangsa. "HMI saat ini punya banyak stok pemimpin muda, karena organisasi ini punya banyak pelatihan perkaderan dan kepemimpinan. Begitu juga dengan organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. Ini merupakan salah satu bukti sebenarnya kita punya banyak stok pemimpin masa depan", katanya. Namun lebih lanjut ia menjelaskan bahwa selama ini yang terjadi seperti ada *invisible hand* yang bergerak mengontrol bangsa ini. Ternyata organisasi-organisasi kemahasiswaan dan pemuda meskipun menjamin adanya stok kader pemimpin, tetapi rupanya mereka tidak menampilkan sikap leadership. Mereka yang telah menjadi pemimpin bangsa dan juga di kalangan parpol itu ternyata dulunya juga aktivis mahasiswa. Lebih dari itu banyak mantan aktivis mahasiswa sekarang berdiri di belakang entah menjadi pemikir atau konseptor para pimpinan nasional maupun di daerah. "Jadi pragmatisme ternyata juga melanda kalangan aktivis mahasiswa yang seharusnya mempelopori pemimpin idelisme", tandasnya. Selanjutnya Ismunandar mengatakan bahwa sebetulnya kalau kita ingin melihat landasan utamanya, maka yang diperlukan saat ini adalah memperbaiki ideologinya. Saat ini kita sudah masuk kedalam jebakan

konspirasi global. Terjadi degradasi pemahaman di kalangan generasi muda kita terhadap ideologi Pancasila. Lihat saja tayangan televisi dan tampilan media-media lain, sudah mengarah pada salah satu perusakan ideologi meskipun kita kurang menyadari. Begitu juga materi pelajaran di SD umpamanya, bukan lagi Pancasila tetapi kewarganegaraan, Pancasila sudah dihilangkan. Itu merupakan persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. "Untuk mempraktekkan ideologi Pancasila dalam aktivitas sosial, memang memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Saat ini Pancasila masih bermain di tataran normatif dan tidak membumi", katanya.

Sementara itu Syamsir menambahkan bahwa kriteria kriteria pemimpin bangsa yang diperlukan antara lain harus punya keberanian, integritas moral, dan punya nasionalisme kuat terutama dalam memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri. Siapa pun yang maju nanti harus memformatkan diri dengan kriteria tersebut. Karena siapa pun yang nanti tampil menjadi pemimpin bangsa nanti, niat pertamanya adalah ingin mengabdikan untuk bangsa dan negara, maka dia akan mendapat dukungan kuat. Kemudian di negara mana pun yang menganut sistem demokrasi, selalu menjadikan hukum sebagai panglima. Maka kemudian seorang pemimpin yang hendak mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat, maka dia akan mendapat simpati dari masyarakat.

Sedangkan M. Sanusi Baco, LC, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel, menekankan pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang imannya (mental spiritualnya) kuat, dan baru kemudian punya ilmu, jangan dibalik. Sekarang ini kita menyaksikan lebih banyak pemimpin yang punya ilmu dan pintar-pintar tetapi miskin iman. Padahal Ilmu tanpa moral agama atau sebaliknya moral agama tanpa ilmu akan membawa malapetaka. Oleh karena itu di sebagian besar negara Barat sekarang ini malah cenderung mengabaikan gelar atau titel pendidikan seseorang kalau mau diangkat menjadi pejabat publik, tetapi lebih mengutamakan faktor integritas moral dan kejujurannya. Kriteria pemimpin yang baik pertama adalah, harus punya jiwa dan semangat



pengabdian untuk masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian jabatan dan pangkat bukan untuk mencari dan menumpuk kekayaan. Kedua, punya iman yang kuat dan punya integritas moral. Ketiga, orangnya harus bersih, tidak pernah terindikasi melakukan perbuatan tercela, termasuk korupsi. Keempat, mampu bersikap adil, yakni menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.

Dalam kaitannya dengan potensi kaum muda untuk memimpin bangsa ke depan, Abdul Karim, Ketua Lembaga Advokasi dan Pendidikan Anak Rakyat, berpendapat bahwa kalau dilihat dari kapasitas, sebenarnya generasi muda kita banyak yang pantas menjadi pemimpin bangsa. Tetapi untuk masuk ke rana itu berat, karena pertarungannya luar biasa. Setiap pemimpin nasional harus diusung oleh partai politik. Unsur independen akan mengalami kesulitan, termasuk kalau dia meminta dukungan partai politik. Karena nanti ada istilah uang titipan kursi dan lain-lain. Kalau untuk memperbaiki kepentingan nasional, maka partai politik harus direformasi terlebih dahulu. "Tokotokoh muda punya kapasitas sebagai pemimpin nasional seperti Anis Baswedan, Joko Widodo, Dahlan Iskan, Faisal Basri. Mereka itu termasuk anak bangsa yang punya potensi luar biasa, tetapi tidak bisa menjadi besar karena tidak berada di panggung politik. Berbeda dengan Anas Urbaningrum, terlepas dari kemungkinan tersandung atau tidak masalah hukum, tetapi karena dia punya panggung politik, Partai Demokrat, maka kemungkinan dia bisa tampil pada Pemilu 2014 nanti", katanya.

Sementara itu Dr. Muhammad, M.Sc, Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol Universitas Hasanudin, memperkirakan beberapa figur muda yang potensial selain Yusuf Kalla yang dikategorikan sebagai generasi tua, yang mampu memimpin bangsa ke depan, kalau dari kalangan militer Prabowo Subianto. Dia punya kapasitas kepemimpinan, kapasitas manajerial yang bagus. Dari Akademisi, seperti Anis Baswedan yang memiliki kepedulian yang luar biasa terhadap pemuda sebagai potensi bangsa, terutama dalam kaitan dengan

proses peralihan generasi kepemimpinan bangsa. Anis juga dikenal kaya dengan program-program pemberdayaan pemuda. Saat ini memang bangsa Indonesia membutuhkan figur pemuda yang punya potensi kepemimpinan yang baik, handal, serta punya kemampuan mendorong dan memajukan sentra-sentra di berbagai segi, tetapi tetap mereferensikan apa-apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan oleh generasi sebelumnya. Tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan sangat berat, sehingga mau tidak mau dibutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya strong, tetapi juga punya kapasitas dalam pengertian status sosial, kapasitas politik, dan terutama punya kemampuan untuk mengharmoniskan potensi-potensi bangsa.

Menyinggung latar belakang pemimpin nasional ke depan, kebanyakan informan setuju bahwa dari kalangan TNI masih dianggap potensial dalam memimpin bangsa ke depan. Akan tetapi dari kalangan generasi muda kampus umumnya kurang berharap agar TNI kembali ke fungsi pertahanan saja, dan menjadi tentara profesional tidak terlalu banyak terlibat ke urusan politik. Sebagaimana dikatakan oleh Ismunandar, tokoh muda kampus ini berharap agar TNI mengurus masalah pertahanan negara saja. Senada dengan itu, Muhammad, dosen Fisip Unhas mengatakan bahwa latar belakang pemimpin tidak terlalu penting, entah dari kalangan akademisi, birokrasi, atau TNI. "Yang penting adalah bahwa semua persyaratan baik integritas, moral, dan kapabilitas harus dipenuhi, karena taruhannya adalah menahkodai sebuah bangsa yang begitu besar, baik dari segi jumlah maupun keragamannya", katanya.

#### Surabaya: Masih Pola Lama

Temuan penelitian lapangan di Surabaya, Propinsi Jawa Timur, menunjukkan bahwa generasi muda masih menunjukkan pola lama dalam berpolitik sehingga belum bisa membentuk barisan kepemimpinan nasional yang baru sesuai perubahan jaman dan perkembangan politik demokrasi sekarang. Kebanyakan aktivitas politik mereka, termasuk juga dalam cara berorganisasi, masih begitu kental diwarnai afiliasi politik berdasar politik



aliran berbasis sentimen primordialisme etno-nasionalis dan keagamaan yang tinggi dan belum menunjukkan sifatnya yang lebih terbuka dan rasional bersifat multi-polar sejalan dengan perkembangan politik multi-partai sekarang. Sebagaimana tercermin dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) dihadiri kalangan pemimpin organisasi mahasiswa dan kepemudaan di Surabaya, persaingan ideologis diantara kelompok Islam dan Nasionalis, misalnya, terutama antara HMI dan GMNI, dalam berbagai isu politik nasional masih kuat mewarnai perdebatan diantara mereka sehingga belum terbuka peluang bagi terbentuknya aliansi atau konvergensi politik bagi kepentingan publik nasional dalam pembentukan kebangsaan dan ke-Indonesiaan yang baru di masa depan.

Pengkotakan ideologis dan afiliasi politik semacam itu tidak berlangsung tidak terlepas dari masih terpelihara dan menguatnya struktur politik patronase di tubuh partai politik yang juga ikut mempengaruhi hubungan mereka dengan kalangan muda dan generasi baru. Meski hubungan itu tidak dalam pengaruh dan kontrol secara langsung, sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan masih dijadikan target bagi kalangan politisi dan faksi-faksi politik di tubuh partai politik dan elit politik pemerintahan untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan politik dari mereka kalangan generasi muda. Sebagaimana dikemukakan aktivis mahasiswa, dalam berbagai kesempatan banyak politisi dari kalangan partai politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, ikut serta bergabung dan mendukung kegiatan kepemudaan dan kemahasiswaan dan bahkan melakukan mobilisasi kaum muda di berbagai peristiwa politik untuk menarik simpati pemuda dan mahasiswa dengan menjalin kedekatan hubungan dengan mereka.

Pragmatisme untuk mendapatkan dukungan politik disini lebih mewarnai hubungan politik lintas generasi ini dibanding berlangsungnya secara sistematis kaderisasi politik melalui proses politik dan pengorganisasian politik di kalangan pemuda dan mahasiswa. Tidak banyak pengorganisasian politik dilakukan untuk pendidikan politik dan membangun

karakter politik demokratis kaum muda dan generasi baru di Indonesia. Akibatnya, kebanyakan aktivisme politik di kalangan kaum muda tetap meneruskan pola lama terkotak-kotak dalam politik aliran dan karena didukung oleh berlangsungnya patrimonialisme kepartaian yang ada sekarang hal itu semakin menambah ketergantungan pemuda dan generasi baru terhadap struktur politik aliran dan patronase politik yang ada. Di tengah pusaran patrimonialisme kepartaian dan terpeliharanya politik aliran itu regenerasi politik berjalan tersendat dan aktivitas politik kaum muda menunjukkan sifat gerakan politik yang semakin berserak dan bersifat sesaat, sangat pragmatis dan reaksioner terhadap dinamika politik dengan sedikit atau minus kepedulian terhadap kepentingan publik dan terbentuknya kepemimpinan merepresentasikan kepentingan publik.

Partikularisme politik dan begitu minimnya kepentingan publik terbentuk itu jelas menghambat regenerasi kepemimpinan politik. Hal itu sangat jelas tercermin, misalnya, dari begitu terbatasnya pemikiran menjadikan kaum muda sebagai agensi politik terlepas dari ketergantungannya dengan patronase politik. Sebagaimana tercermin dalam pandangan sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa, mereka kebanyakan terjebak pada tekanan terhadap aktor politik daripada agensi politik. Konsepsi dan pandangan kepemimpinan politik mereka sangat menekankan pentingnya aktor dan kapasitas individual pemimpin daripada kemampuan pemimpin dalam merepresentasikan kepentingan publik sebagaimana dijalankan model kepemimpinan dalam arti agensi politik. Patron politik umumnya dijadikan rujukan dalam menilai pemimpin yang ideal. Termasuk disini para aktor-aktor politik yang dibentuk atau dimunculkan oleh media massa yang muncul bukan dari proses politik dari bekerjanya kaderisasi dan pengorganisasian politik tetapi lebih pada kehadiran simpul politik melalui media massa.

Namun demikian, sejumlah aktivis pemuda dan mahasiswa juga sangat menyangkan perkembangan politik



menghambat regenerasi politik ini. Di antara mereka terdapat juga kelompok-kelompok yang masih idealis dan memiliki pandangan kedepan mengedepankan kepentingan publik dan regenerasi politik. Di tengah lemahnya kepercayaan terhadap kaderisasi melalui partai politik itu, di antara mereka ada yang berusaha membangun dari dalam dengan mendorong partai politik melakukan perbaikan organisasi politik untuk semakin peduli dengan kepentingan kaderisasi politik dan pembentukan dan regenerasi kepemimpinan, meski sebagian lain lebih suka mengambil jalan diluar sistem kepartaian atau di luar proses politik formal dengan lebih mengedepankan penguatan masyarakat sipil untuk mengontrol bekerjanya sistem politik dan kepartaian.

Partikularisme politik dan pengkotaaan ideologi sejak dini di antara kaum muda dan generasi baru itu tentu saja menghambat terbentuknya ruang publik atau arena politik yang bisa mempertemukan kepentingan berbagai pihak yang sangat penting bagi terbentuknya kepemimpinan dan regenerasi politik nasional. Sejumlah aktivis kepemudaan dan mahasiswa, yang juga disepakati sejumlah pengamat dan kader partai politik, prasyarat penting bagi tumbuhnya kepemimpinan dan regenerasi kepemimpinan politik di tengah masyarakat multi-polar dan demokrasi plural seperti Indonesia ini adalah terbentuknya ruang politik publik mempertemukan generasi baru dari berbagai latar belakang ideologis, lintas partai, lintas kelas dan tingkat sosial-ekonomi, lintas etnis, lintas agama, mampu mengatasi perbedaan dan mengakui kesetaraan di antara mereka sebagai warga negara, untuk membentuk kepentingan publik bersama. Regenerasi kepemimpinan akan berkembang dengan sendiri dari ruang atau ranah publik semacam itu sehingga mampu merepresentasikan kepentingan publik bersama. Regenerasi kepemimpinan tidak muncul dari partikularisme, atau pengkotaaan ideologis, yang akan menjadikan pemimpin akan cenderung diskriminatif, bersikap partikular dan tidak mampu menghadirkan dan merepresentasikan kepentingan publik.

Sehubungan dengan itu, sejumlah kalangan di Jawa Timur, berinisiatif

membentuk aliansi di kalangan aktivis mahasiswa, pemuda, kader partai politik, kelompok kepentingan di masyarakat dan akademisi kampus serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), untuk membentuk Forum Kepemimpinan Indonesia Muda untuk mempertemukan dan menjembatani kalangan pemuda dan generasi baru dari berbagai latar belakang politik, lintas ideologi, lintas kelas-sosial-ekonomi, lintas partai, untuk membentuk ruang publik dan arena politik bersama merepresentasikan kepentingan publik. Menurut mereka, dari sinilah regenerasi kepemimpinan politik ideal itu sebaiknya ditanamkan dan dikembangkan sehingga ke depan akan menghasilkan dan menumbuhkan kepemimpinan yang jauh dari sikap diskriminasi, partikularisme dan eksklusif, tetapi sebaliknya akan tumbuh kepemimpinan bersifat inklusif, menghargai perbedaan dan kesetaraan dan berperan sebagai agensi politik mampu membangun aliansi, koalisi, menjalin ikatan kepentingan bersama dan selalu mengedepankan dan merepresentasikan kepentingan publik.

#### **Padang: Pembajakan Kader Parpol**

Sekarang ini terdapat gejala yang kurang menggembirakan terkait dengan dinamika kepemimpinan di kalangan pemuda. Ada semacam keputusasaan atau hopless di kalangan pemuda ketika membicarakan tema kepemimpinan nasional di masa mendatang. Setidaknya ada dua penyebab utama yang dikeluhkan oleh kaum muda, yaitu semakin banyaknya tokoh muda terlibat kasus dugaan korupsi, dan kedua ada kecenderungan ketidakrelaan generasi tua untuk memberikan tongkat estafet kepemimpinan nasional ke generasi muda. Adip Alfikri salah seorang tokoh pemuda Sumatera Barat yang juga Ketua KNPI Sumbar, mengatakan bahwa kepemimpinan nasional sekarang ini cenderung masih didominasi kaum generasi tua. Akan tetapi mengingat proses generasi merupakan sebuah keniscayaan, maka perlu ditumbuhkan semangat baru di kalangan generasi muda untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan nasional. "Harus diakui memang sekarang ini mulai banyak tokoh muda potensial terlibat kasus



hukum yang mendeligitimasi tokoh muda di mata masyarakat, sehingga muncul pesimisme terhadap prospek regenerasi. Sementara itu di kalangan generasi tua pun masih sangat terasa adanya sikap ketidakrelaan untuk memberikan tongkat kepemimpinan kepada kaum muda. Tapi bagaimanapun harus segera mencari solusi agar proses transformasi kepemimpinan nasional beralih secara mulus kepada kalangan muda, jadi harus tetap optimis", katanya.

Pendapat senada dilontarkan Hairizvan Edwar, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro yang juga Ketua Devisi Penelitian dan Pengembangan BEM Universitas Andalas. Ia berpendapat, kemungkinan kecil terjadi alih generasi, karena faktanya generasi tua masih mendominasi dalam kepemimpinan nasional mendatang. Sebagai contoh Yusuf Kalla masih ingin maju lagi, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh, keduanya pemilik media televisi terkemuka di Indonesia, berambisi menjadi presiden pada Pemilu 2014 nanti. Mereka itu tokoh senior, sehingga kita masih belum bisa berharap banyak akan terjadi perubahan ke arah alih generasi pada pasca Pemilu 2014 nanti.

Sementara itu Syafrizaldi, aktivis LSM Project Manager Fild Indonesia, menyalahkan gejala apatisisme pemuda terhadap masalah bangsa, padahal negeri ini awalnya didirikan oleh kaum muda. Karena itu harus tetap diperjuangkan agar terjadi perubahan ke arah peningkatan spirit nasionalisme di kalangan pemuda. Ketika para politisi tidak serius dalam mengelola negara, maka harapan ditujukan kepada para pemuda untuk memperjuangkan perubahan ke arah yang lebih baik. "Kaum muda sekarang ini sudah memiliki kapasitas dan ditunjang berbagai kemudahan, karena itu tidak ada alasan untuk tidak memberi kesempatan kepada kaum muda. "Meski ada beberapa tokoh muda yang tercemar oleh kasus dugaan korupsi, tetapi masih ada yang bagus, seperti Joko Widodo, Mahfud MD, Anies Baswedan, mereka itu cukup tinggi kredibilitasnya dan berpotensi menjadi pemimpin masa depan. Meskipun kekuatan status quo masih besar, tetapi bangsa ini tetap membutuhkan orang-orang muda yang membawa perubahan", kata Syafrizaldi dengan nada mengingatkan.

Senada dengan itu Syahrji Tanjung, Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, menegaskan bahwa munculnya kepemimpinan baru di kalangan generasi muda sudah sangat diharapkan. Jika selama ini tokoh-tokoh senior yang telah menjadi presiden selama ini kurang berhasil membawa kemajuan bangsa, maka masyarakat sekarang ini menginginkan seorang pemimpin nasional atau presiden baru dari kalangan generasi muda yang bersih dan kredibel. "Hanya saja harus diupayakan agar Parpol mengakomodasi tokoh mudah. Jangan seperti sekarang ini, karena pencalonan presiden tergantung Parpol, maka peluang generasi muda menjadi sangat kecil, sehingga alih generasi tidak terjadi", katanya.

Padahal, jika bicara peran dan fungsi Parpol sekarang ini dalam menjalankan fungsi kaderisasi, semua informan di kota Padang pesimis. Syahrji Tanjung mengatakan bahwa Parpol sekarang ini masih belum bisa diandalkan sebagai pembentuk kader pemimpin bangsa. Demikian pula Adip Alfikri sependapat bahwa Parpol sekarang telah gagal melakukan kaderisasi. "Salah satu sebab mengapa Parpol gagal melakukan kaderisasi adalah tidak ada ideologisasi dalam tubuh Parpol", kata Tanjung. Tiadanya ideologi yang kuat itu kemudian memunculkan fenomena yang oleh Syafrizaldi disebut sebagai era "kutu loncat" kader Parpol, sehingga bajak-membajak kader Parpol juga semakin marak.

Kegagalan Parpol dalam kaderisasi ini di samping mengakibatkan masih dominannya tokoh generasi tua, juga kemudian orang berharap dari kalangan di luar Parpol, seperti dari kalangan akademisi, LSM, birokrasi pemerintah, dan tentu saja dari organisasi militer, yaitu TNI. Hanya saja hampir semua setuju bahwa ke depan Parpol betapa pun buruk kondisinya, tetapi masih akan mendominasi dalam memimpin bangsa. Taruhannya memang kemudian adalah bahwa kegagalan kader Parpol juga akan menyebabkan buruknya citra terhadap politik sipil. Jika ini yang terjadi, maka pemimpin bangsa tetap memerlukan figur dari kalangan militer. "Harus diakui bahwa kepemimpinan sipil sekarang ini, terutama dari kalangan birokrasi cenderung



monoton, tidak inovatif. Sementara dari kalangan militer kecil kemungkinan jika di daerah-daerah. Pemimpin dari kalangan TNI kemungkinan hanya di tingkat pusat", kata Alfitri, dosen Fisip Universitas Andalas.

Namun demikian yang penting menurut Alfitri adalah, bagaimanapun Parpol harus tetap menjaga idealism untuk senantiasa terbuka merekrut orang-orang muda potensial untuk memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Sudah saatnya alih generasi menjadi perhatian semua pihak, terutama kalangan Parpol, karena dalam negara demokrasi Parpol adalah pilar utama dalam mencetak pemimpin bangsa dari kalangan orang-orang muda berbakat.

#### **Ambon: Pemimpin yang Peduli**

"Krisis" kepemimpinan nasional juga dirasakan di kalangan tokoh masyarakat dan pemuda di Ambon, Maluku. Salah satu indikator krisis adalah ketiadaan solusi yang tepat dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tengah masyarakat.

Padahal sebagai bangsa yang besar, nilai-nilai bangsa yang seharusnya menjadi dasar kepemimpinan nasional harus lebih mengemuka. Kepedulian terhadap jati diri bangsa sebagaimana terwujud dalam Pancasila bisa menjadi salah satu ciri karakter pemimpin bangsa.

Ketua DPD KNPI Maluku, Zaharuddin Latuconsina, menilai keteladanan kepemimpinan nasional sudah tidak seperti sebelum era reformasi. "Rakyat sudah kehilangan panutan, akhirnya setiap masalah coba diselesaikan sendiri. Jadilah itu main hakim sendiri," jelasnya.

Salah satu penyebabnya menurut Latuconsina adalah derasnya serbuan kepentingan asing. Belum lagi, hubungan yang renggang antara pemimpin dan pengikutnya memicu kemunculan beragam masalah dan masalah lagi. "Akhirnya yang terjadi adalah banyak unsur pemimpin masyarakat yang tidak lagi dipandang oleh pengikutnya," tuturnya.

Latuconsina berharap momentum Pemilu 2014 akan muncul generasi kepemimpinan baru, khususnya dari kalangan pemuda yang bisa membawa

perubahan bagi bangsa ini. "Masa sih dari Maluku tidak ada yang jadi pemimpin. Di kabinet sudah ada orang Maluku yang menunjukkan potensi dan kemampuannya," cetusnya.

Tokoh masyarakat Rury Moenandar mengatakan peluang bagi kader pemimpin mudasangat besar untuk menjadi pemimpin bangsa. "Kita punya begitu banyak kader-kader pemimpin daerah yang bertebaran dan saya kira ini merupakan peluang dan kesempatan bagi kader-kader muda kita untuk mengisi posisi tersebut," tutur mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini.

Menurutnya, keberadaan generasi muda akan lebih bersemangat dan lebih peduli dengan persoalan-persoalan kerakyatan. "Mereka dapat melihat begitu banyak masalah yang menimpa kepentingan rakyat, terutama di Provinsi Maluku ini," tegasnya.

Taufik Kadafik, seorang jurnalis di media lokal, menyatakan bahwa banyak tokoh muda potensial yang masuk jajaran pemimpin nasional. Hampir semua partai politik, organisasi massa, apalagi organisasi kepemudaan memiliki calon pemimpin. "Saatnya pemuda bekerja untuk memimpin rakyat Indonesia mewujudkan cita-cita kesejahteraan," ujarnya.

Namun, Kadafik, menyatakan bahwa kondisi terakhir cukup membuat sebagian rakyat meragukan kembali kepemimpinan anak muda. "Salah satu kader muda partai politik yang dulunya saya kagumi pun terkait-terkait kasus korupsi," katanya.

Tak berlebihan jika kemudian, tokoh pemuda, Asmin Matdoan berharap pemimpin muda bisa menghindari konflik atau pertentangan yang justru bisa menghancurkan nama baik pemuda Indonesia. "Wajar jika kemudian muncul wacana potong generasi. Pasalnya tidak ada jaminan juga jika kepemimpinan nasional diberikan kepada anak muda akan terjadi perubahan," tambah Matdoan.

Kadafik menegaskan persoalan yang muncul saat ini di lingkup kepemimpinan nasional adalah adanya "sandera" dari partai politik. Bagi Kadafik, kepemimpinan dari partai politik tidak akan menjadi solusi bagi perbaikan masa depan bangsa. "Inisiatif kepemimpinan tidak murni bisa muncul



dan menyelesaikan persoalan bangsa. Karena ada kendala di lingkup partai, baik manajemen maupun kaderisasi," tandas Kadafik.

Berbeda dengan Kadafik, Ketua DPRD Provinsi Maluku M Fatani Sohilauw menyatakan bahwa partai politik masih memegang peran penting dalam kelahiran pemimpin nasional.

"Sistem kita masih mengatur demikian. Dan jika pun ada pemimpin muda yang maju, paling tidak memiliki engalaman memimpin organisasi kepemudaan tingkat nasional, bersahabat, dan punya akses luas, termasuk ke partai politik, tandas Sohilauw.

Ketua MUI Maluku, Idrus Toekan menyatakan bahwa kepemimpinan bangsa yang paling ideal adalah pemimpin yang fokus untuk melihat berbagai persoalan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. "Bukan terfokus terhadap hal-hal yang tidak secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat," jelasnya.

Toekan menyontohkan, jika ada konflik, pemimpin bisa memahami kearifan lokal dan bisa mendorong masyarakat menyelesaikan sendiri tanpa ada jatuh korban. "Di Maluku ada Pela-Gandong, kokohnya persaudaraan dan persatuan rakyat Maluku, yang dianut turun temurun dari para leluhur mereka ratusan tahun silam," tambah Toekan. Menurut Toekan, pemimpin bangsa yang diharapkan adalah pemimpin yang memahami kearifan lokal setiap anak bangsa. "Itulah sebabnya syarat pemimpin dari suku mana atau yang lain harusnya tidak jadi pertimbangan utama. Sebab pemimpin bangsa harus bisa melindungi seluruh rakyat," tandasnya.

Moenandar melihat bahwa pilihan calon presiden 2014 mendatang bukan soal tua atau muda, lama atau baru. "Jika pun ada yang tua memaksa ikut, jelas seleksi alam akan membuat pergantian alami. Sudah waktunya pensiun ya pensiun," tegasnya. Baik tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh politik, sepakat bahwa kepemimpinan bangsa di masa depan lebih didorong oleh adanya integritas.

"Bukan soal usia, sebab saat ini pun generasi muda juga belum muncul ke permukaan. Kalaupun ada sedang terbelit beberapa kasus," tutur Kadafik. Menurut

Latuconsina, integritas akan sangat penting bagi pemimpin bangsa. Karakter bangsa ini harus kembali dibangun. "Sudah saatnya seluruh elemen bangsa mengembalikan Pancasila sebagai filosofi kehidupan bangsa. Jika pun butuh waktu masih ada sisa waktu dua tahun ke depan," jelasnya.

Tapi tuntutan jaman akan terus bergerak dan berubah cepat. Pada akhirnya rakyat sendiri yang menjadi penentu pemimpin seperti apa yang diinginkan sebab, regenerasi bukan hanya tanggung jawab satu orang dua orang. Butuh kepedulian semua rakyat agar hadir pemimpin yang membawa perubahan bangsa ini menjadi lebih baik. Sebagaimana dinyatakan Moenandar, persoalan sesungguhnya bukan hanya soal-soal pergantian pemimpin bangsa. "Jauh lebih penting adalah memahami dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan bukan pergantian presiden atau wakilnya semata," pungkas Moenandar.

#### Penutup

Begitulah, serba-serbi pendapat dan harapan yang berkembang di daerah terkait dengan regenerasi kepemimpinan nasional. Terdapat nada pesimisme, tetapi sekaligus ada optimisme terhadap prospek kepemimpinan kaum muda. Dari kubu pesimistik, berangkat dari kenyataan bahwa ternyata berdasarkan hasil survei, warga masyarakat masih menghendaki generasi tua untuk memimpin bangsa ini. Memang ada juga tokoh muda yang mendapat tempat di hati masyarakat, tetapi pilihan tetap pada kalangan tua. Kondisi ini diperkuat dengan gejala pragmatisme politik yang juga melanda kaum muda. Lebih dari itu kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah tokoh muda potensial, menjadi pertimbangan sendiri mengapa pandangan masyarakat bernada pesimis terhadap pemuda.

Sementara itu Parpol yang secara konstitusional menjadi wahana utama dalam kaderisasi pemimpin nasional, sekarang kurang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai akibat ulah dari elite politiknya. Keterlibatan elite parpol dalam berbagai kasus korupsi dan juga semakin menurunnya tingkat kepedulian terhadap masalah bangsa, menjadikan parpol kehilangan legitimasi di mata rakyat.



Beberapa tokoh muda yang diharapkan menjadi agen pembaruan di tubuh parpol, ternyata justru larut dalam hiruk-pikuk dan gelombang pragmatisme politik. Implikasinya, pandangan masyarakat terhadap parpol sebagai harapan dalam kepemimpinan nasional semakin merosot, karena dianggap gagal menjalankan fungsi rekrutmen politik.

Akan tetapi di tengah suara pesimistik, terdapat juga suara optimistik terhadap proses regenerasi kepemimpinan nasional.

Bagaimana pun kaum muda adalah harapan bangsa, dan lebih dari itu proses regenerasi politik dan kepemimpinan nasional adalah sebuah keniscayaan, sesuatu yang imperatif. Karena itu perlu tetap bersikap optimis terhadap kaum muda. Kubu optimistik ini menganjurkan agar kaum muda melakukan koreksi diri, introspeksi, dan mau terus belajar untuk memperbaiki kesalahan dan senantiasa menatap ke depan.

